

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

PERATURAN LEMBAGA DAN OTORITAS

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020 Tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi Dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik dengan Aset Skala Kecil dan Menengah*.

BUKU

Agus Budiarto. (2009). *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Ghalia Indonesia.

Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group.

Arief, B. N. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.

- Easterbrook, F. H., & Fischel, D. R. (1991). *The Economic Structure of Corporate Law*. Harvard University Press.
- Fuady, M. (2002). *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2005). *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. CV Utomo.
- Fuady, M. (2014). *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2017). *Hukum Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bakti.
- Gifis, S. H. (1984). *Law Dictionary*. Barron's Educational Series.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas (Ed. revisi)*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Clarendon Press.
- Hirman, S. H. (2017). *Hukum Perseroan Terbatas: Prinsip Good Corporate Governance*. Unmer Madiun Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Khairandy, R. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Total Media.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Ed. revisi)*. Kencana.
- Martonomily, M. (2024). *Good Corporate Governance (GCG)*. Martonomily Publishing.
- Mertokusumo, S. (2021). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Ed. revisi)*. Liberty.

- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Panjaitan, H. (2003). *Hukum Penanaman Modal Asing*. Ind-Hill Co.
- Panjaitan, H. (2016). *Hukum Pnanaman Modal: Asing dan Domestik*. Ind-Hill Co.
- Prasetya, R. (2001). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bakti.
- Saragi, P. (2020). *Hukum Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, G. (2003). *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. RajaGrafindo Persada.

JURNAL

- Ansory, W. A. (2022). *Reformulasi Hukum Tentang Hak Gugat Derivatif Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas*. Bonum Commune Jurnal Hukum, 5(1).
- Aurelia, M. (2020). *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Hukum Perseroan Indonesia*. Rechtsvinding, 9(1).
- Bhasudeva, I. D. G. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). *Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investor Pasar Modal Atas Delisting Saham*. Jurnal Preferensi Hukum, 3(2).
- Dwiputrianti, S. (2019). *Corporate Governance Dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Jurnal Administrasi Bisnis, 5(2).
- Firdaus, M. R. (2023). *Derivative Action Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan PMA*. UNES Review, 6(1).
- Hadi, S., Suryamah, A., & Afriana, A. (2021). *Prinsip Business Judgment Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN*. Acta Diurnal, 4(2).

- Hadad, M. (2018). *Model Derivative Action Dalam Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 25(3).
- Ilmar, A. (2017). *Kekosongan Hukum Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(1).
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). *Law And Finance*. Journal of Political Economy, 106(6).
- Munthaha, A. B., Gultom, E., & Sudaryat. (2024). *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam IPO*. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(3).
- Putra, A. A. N. B. A., & Kasih, D. P. D. (2019). *Business Judgment Rule Sebagai Doktrin Imunitas Direksi*. Kertha Semaya, 7(10).
- Putra, M. R. (2021). *Tanggung Jawab Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum*. LEX Renaissance, 6(1).
- Silitonga, E. F., Sunarmi, & Siregar, M. (2022). *Business Judgment Rule Dan Pertanggungjawaban Direksi*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 2(2).
- Sudaryat. (2020). *Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Direksi*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(2).
- Wardani, D. S. (2023). *Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule*. Dharmasisya, 2(3).
- Wahyono, & Cahyo. (2025). *Pertanggungjawaban Direksi Dalam UUPT*. IBLAM Law Review, 5(2).
- Widjaja, G. (2007). *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*. Jurnal Hukum Bisnis, 26(3).

KARYA ILMIAH AKADEMIK

Saragi, P. (2022). *Pertanggungjawaban Hukum Direksi Dalam Perseroan Terbatas* [Tesis Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia].

Yusro, M. A., Sihabudin, & Dewi, A. S. K. (2021). *Urgensi Pengaturan Gugatan Derivative*, (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya).

SUMBER DARING

FJP Law Offices. (n.d.). *Gugatan Derivatif*. <https://fjp-law.com/id/gugatan-derivatif/>

Hukumonline. (n.d.). UUPT 2007 *Pertegas Tanggung Jawab Direksi Dan Komisaris*. <https://www.hukumonline.com>

